

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angger S. Pramukti, Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas Media, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Daru Nugroho, 2022, *Hukum Perdata Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2022, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Evy Lusya Ekawati, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata: Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara*, Genta Press, Yogyakarta.
- H Salim HS dan Erlies S. Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jan. S. Maringka, 2016, *Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Jusuf, 2014, *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097)

Peraturan Kejaksaan No. 17 Tahun 2020 tentang Cara Pembuatan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

C. Artikel Jurnal

Angga dan Ridwan Arifin, 2018, "Penerapan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Karin Jihananda Deriyanti, Edi Wahjuni, and Firman Floranta Adonara, 2022, "Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya", *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1.

Natalis Christian and Lenny Julyanti, 2022, "Analisis Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5, No. 3.

Rudiansya J. Hamonangan, Pratama Indra, Zulwisman, h, 2025. "Perbandingan Kewenangan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dengan United States Department of Justice Office of the

Inspector General Dalam Perspektif Ketatanegaraan”, *HELIUM- Journal of Health Education Law Information and Humanities* Vol. 2 No. 1 Februari 2025

Rudiansyah, 2021. “Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 10 No. 1.

Teguh Subroto, 2017. “Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Pasca Sarjana UNS Volume V Nomor 2*.

Tiar Adi Riyanto, “Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 3, 2021.

Wahyu Donri Tinambunan dan Galih Raka Siwi, 2022, “Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Perubahan UU Kejaksaan,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Yeremia Wijaya and Vera W. S. Soemarwi, 2022 “Analisis Kebijakan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G.S/2021/Pn.Jkt.Pst)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1.

D. Hasil Penelitian Akhir

Arif Rahman Irsady, 2020, “Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Peningkatan Kewajiban Pemberi Kerja Pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta dengan Kejaksaan Negeri Bantul)”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Renny Suryaningsih, 2017, “Tinjauan tentang Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Badan Usaha Milik Negara”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Febri Arrahim, 2023, “Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Upaya Menyelamatkan Aset Negara di Bidang Perdata pada

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

E. Internet

Feri Wibisono, “Jaksa Menyapa: Mengenal Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara.” Wawancara oleh iNews TV. iNews TV, 22 Februari 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=pcmK6msD60s> diakses 2 Juli 2025.

Fitri Novia Heriani, 2021, Polemik Permohonan PKPU Jiwasraya, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-permohonan-pkpu-jiwasraya-lt608a67b659dc3/?page=all#!>, diakses 28 Juni 2024.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Survei Indikator Politik: Kejaksaan Agung Masuk 3 Institusi Paling Dipercaya Publik.” 22 April 2024. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/survei-indikator-politik-kejaksaan-agung-masuk-3-institusi-paling-dipercaya-publik-116302-mvk.html> diakses 27 April 2025).

Kiki Safitri, Novianti Setianingsih, 2025, Komjak Terima 869 Laporan Pengaduan Sepanjang 2024, Jakarta Terbanyak, *Kompas.com*, (06 Januari 2025), <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/18164871/komjak-terima-869-laporan-pengaduan-sepanjang-2024-jakarta-terbanyak>, diakses pada tanggal 25 April 2025

Pwc, 2015, "State-owned enterprises: Catalysts for public value creation?", PwC Public Sector Research Centre, <https://www.pwc.com/gx/en/psrc/publications/assets/pwc-state-owned-enterprise-psrc.pdf>, diakses pada tanggal 2 Juli 2024.

Raja Eben Lumbanrau, 2019, “Jiwasraya: Dari gagal bayar klaim triliunan rupiah hingga dugaan tindakan curang”, *bbc.com*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50821662#:~:text=Direktur%20Utama%20Jiwasraya%2C%20Hexana%20Tri,diperkirakan%20mencapai%20Rp49%2C6%20triliun>. diakses pada tanggal 28 Juni 2024.

Tim Hukum Online, 2014, “Jaksa Pengacara Negara di Mata SEMA dan PERJA,” Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-pengacara-negara-di-mata-sema-dan-perja-lt5369c9d68dde2/>.

Tsarina Maharani, Kristian Erdianto, 2021, “Survei SMRC: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan 59 Persen.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/14421261/survei-smrc-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-59-persen>
Kompas.com diakses 27 April 2025.

F. Lain-lain

Hasil Wawancara dengan Zaenur Rohman selaku Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM)

Kejaksaan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024, Jakarta.